

KONSEP SUSTAINABLE DEVELOPMENT BERBASIS KEMITRAAN SEKTOR PUBLIK DAN BISNIS

Bambang Irawan

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
bambang.irawan@stiami.ac.id

Abstract. *As a concept which has opportunities and challenges, sustainable development needs to take a calculation for the social, ecological and economic together and holistic as a dynamic aspect. Therefore, it takes a viewpoint that is oriented towards achieving competitive advantage through partnership mechanisms. One of kinds in a partnership is Public-private partnerships. As a form of alliance in public and private sectors, it aims to develop public facilities in order to improve public services and have a positive impact for all parties working together.*

Keyword: *sustainable development, partnerships, Public-Private Partnerships*

Abstrak. Sebagai sebuah konsep yang memiliki peluang sekaligus tantangan, *sustainable development* harus mempertimbangkan aspek sosial, ekologi dan ekonomi secara bersama-sama dan menyeluruh sebagai sebuah kajian yang dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sudut pandang yang berorientasi pada tercapainya keunggulan kompetitif melalui mekanisme kemitraan. Salah satu jenis dalam suatu kemitraan adalah kemitraan publik-swasta. Sebagai bentuk aliansi di sektor publik dan swasta, bertujuan untuk mengembangkan fasilitas umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan berdampak positif bagi semua pihak bekerja sama.

Keyword : *sustainable development, kemitraan, Public-private Partnerships*

Konsep *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan mengacu kepada upaya mempertahankan prinsip pembangunan yang berkesinambungan dari waktu ke waktu. Ada banyak definisi terkait *sustainable development* saat ini beredar dan banyak pula penafsiran yang berbeda telah diterapkan pada tataran praktis (Gibson, 2005). Memahami definisi tentang *sustainable development* merupakan hal yang penting, karena memahami definisi merupakan dasar dimana sarana (strategi, kebijakan dan mekanisme) dapat digunakan untuk

mencapai pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi bagaimana manusia dan kondisi lingkungan menjadi kajian yang tidak pernah ada habisnya dan dapat dilihat atau dipahami sebagai dasar intervensi selanjutnya.

Disiplin ilmu yang beraneka ragam memiliki pengaruh dan kontribusi pada dialog *sustainable development*. Masing-masing perspektif membuat asumsi yang berbeda tentang hubungan antara lingkungan dan manusia (Lee et al, 2000: 9), dan nantinya dapat dijadikan dasar untuk prioritas dan rekomendasi dalam hal

kebijakan atau program yang akan dijalankan. Selain itu, prinsip-prinsip yang dianut dalam sustainable development dan fenomena empiris yang muncul merupakan progres menuju pada hakikat pembangunan berkelanjutan sebenarnya. Selain itu banyak juga banyak ketidakpastian dan kontestasi tentang bagaimana cara terbaik untuk mempromosikan perubahan yang berkelanjutan dan memperhatikan dampak dari kebijakan dan mekanisme yang diambil menuju pembangunan berkelanjutan sejati.

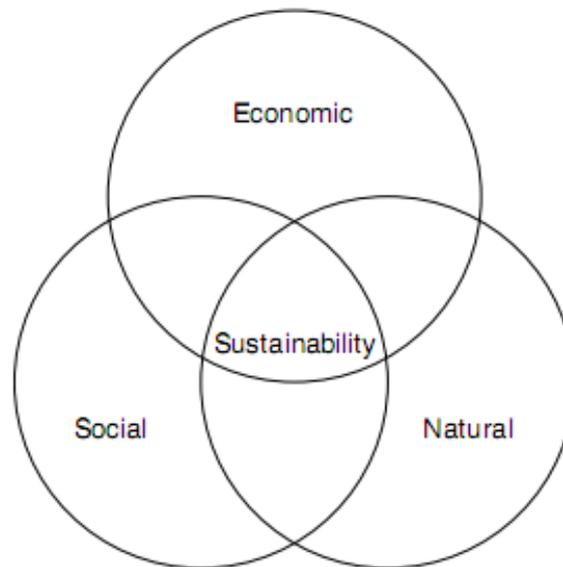
Optimalisasi kebijakan dalam konteks pertumbuhan yang berkelanjutan akan berusaha untuk mempertahankan diterimanya tingkat pertumbuhan perkapita pendapatan riil tanpa menghabiskan stok aset modal nasional maupun stok aset lingkungan alam (Turner, 1988: 12), kemampuan untuk melakukan apa yang mereka memiliki alasan yang baik untuk nilai terus ditingkatkan. (Sen, 1999).

Pada umumnya, pembangunan berkelanjutan terbentuk dari tiga factor atau pilar, seperti yang terlihat pada Gambar 1 berikut. Seperti halnya logika dalam arsitektur, Faktor-faktor atau pilar-pilar tersebut mengkonfirmasi kebutuhan akan pertimbangan aspek sosial, ekologi dan ekonomi secara bersama-sama dan

menyeluruh jika menginginkan pembangunan tetap berjalan dan berkelanjutan. Namun, dalam tataran praktis, interkoneksi antara harapan dan kebutuhan untuk mengintegrasikan pemikiran dan tindakan dalam pembangunan berkelanjutan yang melintasi batas-batas disiplin tradisional dan pembuatan kebijakan yang ditetapkan sepertinya belum didukung oleh komunikasi efektif (dapat dilihat pada gambar 1).

Prinsip-prinsip ini dari pembangunan berkelanjutan yang mungkin lebih baik digambarkan oleh saling lingkaran dengan pembangunan berkelanjutan sebagai mana lingkaran berpotongan. penggambaran tersebut memberikan perhatian pada tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai berusaha untuk memaksimalkan tujuan di semua tiga bidang pada waktu yang sama dan kemungkinan menghasilkan keuntungan saling mendukung satu sama lain yang dapat dilakukan melalui tindakan pembangunan berkelanjutan. Daerah kecil yang merupakan arsiran terhadap seluruh lingkup atau pilar menggambarkan sifat berkelanjutan dari banyak kegiatan, tetapi juga membuka ide potensi untuk memperluas daerah ini arsiran menjadi lebih positif.

Gambar 1
Tiga Faktor Utama Pembentuk Sustainability Development



Sumber : Elliot, A.J. (2013)

Satu hal yang tidak boleh dilupakan, model ini mendukung pemahaman bahwa mencapai pembangunan berkelanjutan dalam praktek secara teratur melibatkan berbagai sudut pandang dari lingkup yang berbeda. Sebagai contoh, pilihan sulit dalam pembangunan berkelanjutan harus dibuat pada tahapan tertentu, pada waktu dan skala yang khusus pula. Hal ini terkait dengan tujuan yang ahendak dicapai dan bagaimana cara mendapatkannya. Adanya tujuan yang jelas dan bersinergi dalam pencapaian tujuan lain akan membawa dampak yang tidak sama terhadap kepentingan dan kelompok yang bekerjasama. Hal ini merupakan keniscayaan dan merupakan persyaratan

dalam 'sistem berpikir' pada konsep pembangunan berkelanjutan.

Tantangan Kemitraan dalam Sustainability Development

Kemitraan atau aliansi merupakan desain yang relevan dan banyak digunakan serta telah menjadi acuan untuk menjalankan aktivitas bisnis dan urusan publik. Aliansi merupakan kolaborasi antara setidaknya dua organisasi independen yang bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang tidak dapat dicapai tanpa adanya kemitraan tersebut. Aliansi ditandai dengan tujuan bersama, melibatkan beberapa bentuk distribusi pendapatan, dan biaya serta risiko yang muncul antara

mitra yang menjalin kerjasama (Man, 2013).

Penjelasan terkait konsep kemitraan di atas, mengisyaratkan bahwa banyak bentuk yang memungkinkan aliansi tersebut dapat terwujud. Secara umum, Man (2013) membagi aliansi ke dalam dua bentuk yakni aliansi ekuitas dan aliansi kontrak. Aliansi ekuitas melibatkan pengaturan kepemilikan saham, perlakuan terhadap saham minoritas dari salah satu perusahaan, perusahaan *joint venture*, yang merupakan badan hukum yang terpisah di mana dua atau lebih perusahaan memiliki saham. Namun, sebagian besar bentuk aliansi adalah kontrak dan keragaman aliansi kontrak mungkin juga signifikan terhadap jumlah aliansi itu sendiri. Bahkan, keragaman ini menunjukkan kekuatan aliansi dan salah satu alasan utama untuk popularitas mereka, seperti setiap perjanjian dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mitra. Secara bersamaan, bentuk aliansi secara khusus telah banyak muncul dalam praktek di dunia saat ini.

Seiring perjalanan waktu, telah muncul beberapa bentuk aliansi baru seiring dengan tuntutan adaptasi struktur dan proses tata kelola yang dirancang dan terus diciptakan untuk menghadapi tantangan zaman. Dalam perkembangan kemitraan tersebut, setidaknya terdapat

tiga era pembangunan aliansi yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Generasi pertama, yakni era *joint venture* sampai tahun 1990-an. Dalam era ini, penggunaan usaha patungan relative lebih dominan dan diutamakan dalam pencapaian tujuan organisasi menuju level internasional. Kemitraan ini memiliki orientasi dalam menciptakan skala ekonomi atau untuk mendapatkan benefits yang berkaitan dengan kegiatan organisasi yang tidak bersifat utama atau bisnis inti organisasi, dengan jumlah organisasi yang bermitra adalah terbatas;
2. Generasi kedua, yakni era kontrak dari awal 1990-an hingga 2010. Pada era ini, aliansi kontrak menjadi lebih penting daripada usaha patungan. tujuan kemitraan ini lebih berorientasi pada inovasi, flexibility, dan berkaitan dengan dinamika lingkungan bisnis. Kemitraan dalam model ini lebih berorientasi pada *core* bisnis organisasi yang beraliansi. Selama periode ini, jumlah organisasi yang aliansi tumbuh pesat dan kemitraan menjadi cara normal mengorganisir kegiatan ekonomi, dan sebagian besar dari kemitraan ini bersifat bilateral;

3. Generasi ketiga dari kemitraan adalah aliansi terbuka. Pada konteks ini, model kemitraan yang muncul yang berpusat pada aliansi *multi-partner*, inovasi terbuka, dan penciptaan nilai bersama. Jenis kemitraan ini pada prinsipnya tidak menghilangkan sama sekali aliansi *multi-mitra* yang ada sebelum tahun 1990-an dan usaha patungan yang ada, namun sebagai generalisasi, karakteristik prinsip-prinsip *open innovation* dan penciptaan *shared values* mendapat porsi yang luas untuk mendukung perkembangan kemitraan dalam level praktis (Man, 2013).

Perkembangan kemitraan di atas ada hubungannya dengan perubahan lingkungan bisnis organisasi. Pengurangan hambatan antara *supply* dan *demand* memungkinkan konstelasi besar banyak organisasi untuk membentuk kemitraan ini. Internasionalisasi pembangunan pengetahuan juga menuntut organisasi untuk memasuki sumber pengetahuan di seluruh dunia melalui mitra. Selain itu, saat ini organisasi telah banyak menguasai keterampilan mengelola aliansi bilateral dan siap untuk bermetamorphosis ke tingkat berikutnya yang lebih kompleks.

***Public-Private Partnerships* sebagai Bentuk Kemitraan Ideal**

Public-private Partnerships (PPP) atau kemitraan publik-swasta merupakan bentuk aliansi jangka panjang terbentuk antara sektor swasta dan badan-badan publik seiring dengan tujuan mengeksplorasi sumber daya sektor swasta dan keahlian dalam penyediaan dan pelayanan publik. Pada skema *public-private partnership* tersebut, sumber daya dan risiko dibagi antara sektor publik dan swasta memiliki tujuan untuk mengembangkan fasilitas publik dalam rangka meningkatkan pelayanan publik (Norment, 2002).

Public-private Partnerships dapat digambarkan sebagai kontrak perjanjian kepemilikan bersama antara badan publik dan perusahaan swasta, dimana, sebagai mitra, kedua belah pihak akan berbagi sumber daya bersama dan berbagi risiko dan manfaat, untuk menciptakan efisiensi dalam produksi dan penyediaan barang publik atau swasta. Konsep *Public-private Partnerships* menyiratkan bahwa ada beberapa tanggung jawab bersama antara sektor publik dan sektor swasta dalam pencapaian hasil atau kegiatan bersama (Collin, 1998). Konteks hubungan ini memiliki perbedaan dengan jenis hubungan lainnya antara publik dan sektor swasta, di mana sektor publik mempertahankan kontrol atas kebijakan yang diambil setelah menerima saran dari organisasi di sektor swasta.

Public-private partnerships umumnya adalah struktur organisasi yang terpisah, bukan hubungan tawar yang telah ditetapkan antara organisasi yang bersifat otonom. Grant (1996) berpendapat bahwa berbagi kewenangan dan tanggung jawab, investasi bersama, berbagi risiko dan saling menguntungkan merupakan inti dari konsep kemitraan. Menurut Plummer (2000), *Public-private partnerships* secara khusus mengacu pada bentuk-bentuk kemitraan di mana pemerintah menetapkan bentuk kerjasama dengan sektor swasta di mana sektor swasta menyediakan beberapa bentuk investasi di dalamnya. Dengan demikian, terminologi *Public-private partnerships* memiliki kecenderungan bukan hanya untuk layanan dan kontrak manajemen kemitraan, tetapi mencakup sewa dan konsesi.

World Bank (2005) dalam Akinoye dan Beck (2009), mengambil sudut pandang yang lebih holistik dalam mendefinisikan *Public-private partnerships* sebagai semua bentuk investasi (publik dan swasta) dalam proyek-proyek yang melibatkan partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor publik. Secara khusus, *Public-private Partnerships* telah diidentifikasi empat kategori, yakni:

1. Manajemen dan sewa kontrak. Bentuk ini merupakan kontrak di mana badan swasta mengambil alih pengelolaan

perusahaan milik negara untuk periode tertentu dan kepemilikan dan keputusan investasi tetap dimiliki oleh pemerintah. Dalam kontrak manajemen, pemerintah membayar operator swasta untuk mengelola fasilitas dengan mengasumsikan risiko operasionalnya, sementara pada kontrak sewa pemerintah menyewakan kepada operator swasta yang mengambil risiko operasional dalam menjalankan aktivitasnya.

2. Konsesi. Pada jenis ini, entitas swasta mengambil alih pengelolaan perusahaan milik negara selama periode tertentu dan juga mengasumsikan resiko investasi secara signifikan. Yang termasuk dalam jenis konsesi ini : merehabilitasi, mengoperasikan, and mentransfer; merehabilitasi, *leasing* atau menyewa, dan mentransfer; dan membangun, merehabilitasi, mengoperasikan dan mentransfer.
3. Proyek *Greenfield*. Jenis ini memiliki empat kategori: membangun, menyewa dan memiliki; membangun, memiliki, dan mentransfer, atau membangun, memiliki, mengoperasikan, dan mentransfer; membangun, memiliki dan mengoperasikan; dan proyek atas perdagangan, di mana organisasi swasta atau perusahaan patungan

publik-swasta membangun dan mengoperasikan fasilitas baru selama periode ditentukan dalam kontrak proyek.

4. Divestasi. Hal ini dilakukan melalui transfer ekuitas pemerintah secara penuh atau parsial transfer pemerintah, dimana pihak swasta membeli saham ekuitas di perusahaan milik negara melalui penjualan aset, penawaran umum, atau program privatisasi.

Pada dasarnya, tingkat keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan sektor publik berkisar dari penyediaan layanan murni, ketiadaan akses untuk fasilitas umum, penyediaan layanan berbasis pada penggunaan fasilitas umum hingga kepemilikan fasilitas umum. Gentry dan Fernandez (1998) mencatat bahwa bentuk kepemilikan diadopsi tergantung pada isu-isu seperti: tingkat kontrol yang diinginkan oleh pemerintah; kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan yang diinginkan; kapasitas pihak swasta untuk menyediakan layanan; kerangka hukum dalam hal regulasi dan evaluasi; dan ketersediaan sumber daya keuangan dari sumber-sumber publik dan swasta. Contoh fasilitas yang dikembangkan melalui proyek pendanaan dengan mekanisme *Public-private Partnerships* meliputi, pembangkit energi, perkembangan jaringan pipa,

pembangunan pertambangan, jalan tol, pembuangan limbah dan telekomunikasi (IIPF, 2005).

Daftar Pustaka :

- Collin, S., 1998. In the twilight zone: a survey of public-private partnerships in Sweden. *Public Productivity and Management Review*, 21(3), 272–283.
- Elliot, A.J., 2013. *An Introduction to Sustainable Development, Fourth Editions*, London : Roudledge
- Akintoye, A. and Beck, M., 2009. *Policy, Finance & Management for Public-Private Partnerships*, West Sussex : John Wiley & Sons
- Gentry, B. and Fernandez, L., 1998. Evolving public private partnerships: general themes and examples from the urban water sector. *OECD Proceedings, Globalisation and the Environment*, Perspectives from OECD and Dynamic Non-Members Economies, pp. 99–125.
- Gibson, R.B., 2005. *Sustainability Assessment*, London : Earthscan
- Grant, T. (1996) Keys to successful public-private partnerships. *Canadian Business Review*, 23(3), 27–28.
- IIPF, 2005. International project finance. http://members.aol.com/projectfin/project_finance_links.htm.
- Lee, K., Holland, A. and McNeill, D. (eds). 2000, *Global Sustainable Development in the Twenty-First Century*, Edinburgh: Edinburgh University Press
- Man, A. Pieter de, 2013. *Alliances : An Executive Guide To Designing Successful Strategic Partnerships*, West Sussex : John Wiley & Sons

- Norment, R., 2002. PPPs – American style. *The PFI Journal*, 39, 26.
- Plummer, J. (2000) *Private Sector Participation In Water And Sanitation Services In Stutterheim, South Africa*. Building Municipal Capacity for Private Sector Participation, Working paper 44201, GHK International, 526 Fullham Rd, SW6 5NR, London,
<http://www.undp.org/pppue/library/publications/stutterheim.pdf>.
- Sen, A., 1999. *Development as Freedom*, Oxford : Oxford University Press
- Turner, R.K., 1988. *Sustainable Environmental Management*, London : Belhaven